

IMPLEMENTASI PROGRAM *CLEANLINESS, HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT* DALAM MENDUKUNG SEKTOR PARIWISATA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BINTAN

(Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan)

IMPLEMENTATION OF THE CLEANLINESS, HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT PROGRAM IN SUPPORTING THE TOURISM SECTOR DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN BINTAN REGENCY ***(Case Study of the Bintan Regency Culture and Tourism Office)***

Zainab¹, Edison², Fitri Kurnianingsih³

¹²³Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Email : zainabandri23@gmail.com¹, edison@umrah.ac.id²,
fitrikurnianingsih@umrah.ac.id³

Abstrak : Program *Cleanliness, Health, Safety, Environment* (CHSE) merupakan proses sertifikasi kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Program CHSE Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bintan. Landasan Kebijakan CHSE adalah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan. Pendekatan ini memakai Kualitatif dengan teknik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang di dapat di analisis menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles and Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan hasil penelitian Implementasi CHSE di Kabupaten Bintan belum berjalan secara optimal secara menyeluruh di sektor usaha pariwisata hal ini dibuktikan hanya 64 Usaha Pariwisata yang sudah mendapatkan sertifikasi CHSE, sementara itu ada sekitar 256 Sektor Usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan belum mendapatkan sertifikasi CHSE. Hal ini disebabkan minimnya kesadaran dari pemilik Pelaku Usaha Pariwisata dan kurang *responsive* terhadap kebijakan dari Program CHSE, kurangnya motivasi dari Penyelenggara Kebijakan terkait Program CHSE ini. Kendala lainnya berhubungan dengan tidak ada kemampuan pelaku usaha pariwisata terkait dana yang akan dikeluarkan untuk memenuhi Indikator CHSE.

Kata Kunci : Implementasi, Program Cleanliness, Health, Safety, Environment, Pariwisata

Abstract: The *Cleanliness, Health, Safety, Environment* (CHSE) Program is a certification process for Tourism Businesses, Tourism Destinations and other Tourism Products to provide guarantees to tourists for the Implementation of Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability. This study aims to determine the extent of the implementation of the CHSE Program in Supporting the Tourism Sector During the Covid-19 Pandemic Period in Bintan Regency. The cornerstone of the CHSE Policy is the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy/Head of the Tourism and Creative Economy Agency of the Republic of Indonesia Number 13 of 2020 concerning Standards and Certification Hygiene, Health. This approach uses qualitative and documentation. The data that can be analyzed using the approach developed by Miles Huberman includes data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study uses the Van Meter and Van Horn theory with the results of the research not running optimally, this is evidenced by only 64 tourism businesses that have received CHSE certification, meanwhile there are around 256 tourism business sectors in Bintan Regency that have not received CHSE certification. This is due to the lack of awareness of the owners of the Tourism Entrepreneurs and less responsive to the policies of the CHSE Program, the lack of motivation from the policy Organizers related to the CHSE Program. Another obstacle relates to the lack of capacity of tourism business actors regarding the funds to be issued to meet the CHSE Indicators.

Keywords: Implementation, Cleanliness Program Health Safety Environment, Tour

PENDAHULUAN

Tahun 2020 akan menjadi sejarah sebagai tahun terjadinya wabah mematikan berskala global yang melumpuhkan berbagai aktivitas perekonomian dunia. Wabah itu dinamakan dengan *Covid-19*, yang merupakan singkatan dari *Coronavirus Disease-19*. WHO (*World Health Organization*) sebagai organisasi kesehatan dunia telah menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Untuk menekan angka penyebaran dari *Covid-19* ini salah satu upaya pemerintah dengan melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dengan tujuan membatasi mobilitas manusia (Green, 2020). Kebijakan pembatasan tersebut tentunya akan berdampak kepada aktivitas diberbagai sektor. Menurut analisis ekonomi Ronald Beger dan Dcode salah satu sektor yang merasakan dampak pandemi Covid-19 industri pariwisata. Akibat dari itu banyak wisatawan lokal maupun mancanegara membatalkan niat untuk mengunjungi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia per Juli 2020 mengalami penurunan sebesar 88,82% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada Juni 2019. Selain itu angka ini juga mengalami penurunan sebesar 2,06% dari bulan Juni 2020. Secara kumulatif (Januari–Juni 2020), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 3,09 juta kunjungan atau turun 59,96 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 7,72 juta kunjungan (BPS, 2020). Sementara itu Wisatawan Mancanegara yang datang ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan Desember 2021 berjumlah 163.619 kunjungan atau mengalami penurunan sejumlah -0,28% jika dibandingkan dengan bulan Desember 2020 yang berjumlah 164.079 kunjungan. (Kemenparekraf/Baparekraf, 2021).

Kepulauan Riau salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam seni dan budaya, yang merupakan salah satu bidang penting dalam pariwisata. Pariwisata di Kepulauan Riau juga merupakan salah satu sektor utama dalam mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi. Salah satu Objek Daya Tarik Wisata

(ODTW) yang terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara adalah Kawasan Wisata Lagoi yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional yaitu sebagai penghasil devisa dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa. Hal ini nampak dari keseriusan berbagai daerah dalam mengelola sektor pariwisata dengan tujuan supaya menjadi satu tujuan kunjungan wisata internasional dan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat begitu pula dengan daerah Kabupaten Bintan.

Data BPS menyebutkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara datang di Kepulauan Riau pada tahun 2019 sebanyak 2.864.795 pengunjung. Terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ini mengakibatkan penurunan sangat drastis yaitu berjumlah 411.248. Hal ini juga didukung dengan adanya peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang larangan sementara bagi orang asing untuk masuk maupun transit di Indonesia.

Covid-19 termasuk bencana non alam jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah Covid-19 akan terasa di seluruh sektor yang berkaitan dengan pariwisata, seperti perekonomian masyarakat lokal, mata pencaharian, dan lain-lain. Sebanyak 992 Tenaga Kerja di PHK dan 2.505 tenaga kerja dirumahkan. Selain itu estimasi penambahan penduduk miskin juga meningkat hal ini 1% sampai 2% selama pandemic Covid. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dan jutaan mata pencaharian di seluruh dunia terkena dampak Covid-19 (Sugihamretha, 2020).

Data BPS menyebutkan bahwa jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Bintan pada tahun 2018 mencapai 503.542 jiwa (BPS, 2019). Sebelum adanya wabah Covid-19 pengunjung di Kepulauan Riau cukup menjadi daya tarik bagi wisatawan

dalam Negeri hingga Luar Negeri hal ini bertolak belakang akibat adanya wabah Covid-19 yang mana telah memberikan dampak negatif bagi semua sektor usaha termasuk sektor Industri Pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan. Berikut data kunjungan wisatawan domestik yang datang ke Kabupaten Bintan:

TABEL 1. KUNJUNGAN WISATAWAN DOMESTIK KE KABUPATEN BINTAN

No	Tahun	Jumlah Wisatawan (dalam jiwa)
1	2018	420.749
2	2019	348.761
3	2020	120.058
4	2021	169.551

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bintan, 2021

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018-2019 wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung di abupaten bintan, tetapi pada tahun 2020-2021 wisatawan domestik lebih banyak dari pada wisatawan mancanegara ini juga dikarenakan pada tahun 2020 munculnya wabah Covid-19 dan menyebabkan wisatawan mancanegara terbatas untuk masuk ke Indonesia. Mengacu pada rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, salah satu kebijakan pada sektor pariwisata yang di arahkan pada pengembangan pemasaran usaha. Namun munculnya wabah Pandemi Covid-19 meberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Khususnya Kabupaten Bintan yang mempunyai sektor Pariwisata yang menjadi penggerak ekonomi, seketika lumpuh akibat wabah Covid-19 ini. Namun, Pemerintah tetap mencari solusi terkait Wabah yang menyerang sektor Pariwisata ini.

Memaknai Upaya Progresif tersebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Barekraf) meluncurkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Kabupaten Bintan menerima sertifikat pertama Indonesia *Care (IdoCare)* ini merupakan salah satu bentuk kesiapan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau dalam

melaksanakan Protokol Kesehatan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*). Program CHSE berfungsi sebagai panduan untuk kegiatan operasional sebuah daya tarik wisata yang tetap ingin buka tetapi dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar CHSE yang telah ditetapkan pemerintah. Pada Tanggal 26 September 2021 Kabupaten Bintan mendapatkan Sertifikat pertama Indonesia Care (*IdoCare*).

Alasan Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Barekraf) memilih Kabupaten Bintan sebagai penerima sertifikat CHSE ini adalah karena Bintan merupakan *One of the lowest hanging fruit* dan juga memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata kedepannya. Dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestraian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Hal tersebut masuk dalam salah satu Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*).

Salah satu upaya untuk membangkitkan pariwisata, Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan kebijakan penerapan *Cleanliness, Health, Safety, Environment* (CHSE). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberi dukungan pembukaan pariwisata bagi wisatawan lokal dan nusantara, agar para wisatawan tersebut merasa aman dan nyaman dalam berwisata. Namun, Implementasi berjalannya program CHSE ini masih menunggu efeknya keseluruhan bagi pemulihan sektor pariwisata yang sampai saat ini masih belum teridentifikasi mendapatkan Sertifikasi CHSE.

Berdasarkan data bahwasanya di Kabupaten Bintan terdapat 85 usaha yang sudah terserifikasi CHSE sementara itu sektor usaha pariwisata di Kabupaten Bintan mencapai 900 sektor usaha pariwisata, diantara kategori usaha pariwisata yang sudah terserifikasi program CHSE adalah yaitu Daya Tarik Wisata (3 Usaha Terserifikasi), *Home*

Stay/Pondok Usaha (21 Usaha Terifikasi), Hotel (31 Usaha Terserifikasi), Restoran Rumah Makan (23 Usaha Terserifikasi), Tempat Penjualan Cendramata (3 Usaha Terserifikasi), Usaha Golf (2 Usaha Terserifikasi), Usaha Jasa Transportasi Wisata (2 Usaha Terserifikasi). Bisa kita lihat kategori usaha pariwisata belum adanya terserifikasi Program CHSE pada bagian usaha-usaha pariwisata tingkatan menengah sampai ke bawah seperti wisma, Rumah makan yang di daerah Kawasan Pariwisata yang masih terbilang sederhana. Menurut data CHSE, pelaku wisata di Bintan yang sudah registrasi sertifikasi CHSE sebanyak 60 restoran, hotel dan resort. Kesemuanya mendaftarkan diri secara online di laman <https://chse.kemenparekraf.go.id/>. Sementara itu belum meratanya pelaku sektor usaha pariwisata yang belum terserifikasi sertifikat CHSE ini.

Pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata. Tentunya dengan adanya program CHSE ini dapat menjadi pedoman dan standar dalam sektor pariwisata. Dalam Penerapan Program CHSE ini masih banyaknya sektor-sektor Usaha Pariwisata yang belum mendapatkan sertifikasi CHSE. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “*Bagaimana Implementasi Program Cleanliness, Health, Safety, Environment Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan)*”

Perekonomian secara umum di Kabupaten Bintan mengakibatkan penurunan, itu disebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi Covid-19 tidak hanya itu karyawan yang bekerja di hotel-hotel, pelayan restoran yang bekerja di tempat pariwisata banyak pendapat pemutusan hubungan kerja dan bekerja dari rumah bahkan pelaku usaha di daerah-daerah wisata juga sepi dan tutup akibat sepi pengunjung.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan guna melihat bagaimana Implementasi dari Program CHSE dalam mendukung sektor pariwisata Kabupaten Bintan. Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis data yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi dari Program CHSE dalam mendukung sektor pariwisata Kabupaten Bintan. Penelitian ini kemudian melihat sejauh mana tercapainya program *Cleanliness, Health, Safety, Environment* (CHSE) sebuah program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, tentu dibuat untuk suatu tujuan tertentu yang memberikan dampak terhadap objek yang menjadi sasaran oleh program CHSE ini seperti sektor pariwisata dan seluruh pelaku usaha di bagian pariwisata. Tujuan-tujuan dari sebuah program tentu dapat dijadikan sebuah landasan prihal pelaksanaannya ataupun disebut juga dengan implementasi dari sebuah kebijakan. Dalam pelaksanaan program dapat dilihat bagaimana kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pelaksanaan secara langsung. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino 2016:13). Hasil analisis Implementasi Program *Cleanliness, Health, Safety, Environment* (CHSE) Dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kabupaten Bintan dilihat dari penilaian indikator pada teori Implementasi yang dipengaruhi oleh enam indikator yakni:

1. Analisis Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan di dalam program *Cleanliness, Health, Safety, Environment* (CHSE) ini juga bisa mengukur kinerja Implementasi Kebijakan dengan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus di capai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pada dasarnya standar kebijakan yang dibuat oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif harus mempunyai standar kebijakan dan sasaran kebijakan yang jelas. Sehingga apa yang menjadi standar kebijakan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan hasil yang di inginkan.

Dari indikator keberhasilan program dalam pelaksanaan Program CHSE di Kabupaten Bintan bisa dikatakan belum efektif hal ini bisa dilihat sektor usaha pariwisata kelas menengah ke atas semuanya sudah mendapatkan sertifikasi CHSE, untuk sektor usaha kelas menengah kebawah memang terkendala dari biaya pelaku usaha untuk memenuhi indikator CHSE, sementara itu masih banyak sektor usaha kelas menengah ke bawah perlu mendapatkan pelatihan dan solusi dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan serta indikator yang ada di dalam Program CHSE itu sendiri.

2. Analisis Sumber Daya

Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini Implementasi Program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) harus adanya dukungan Sumber Daya, baik itu sumber daya manusia sumber daya non manusia.

Seperti para implementor kebijakan, khususnya dinas pariwisata Kabupaten Bintan haruslah mempunyai manusia-manusia yang paham akan program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) ini mulai dari segi pendaftaran hingga proses sertifikasi. Sehingga ini bisa menjadi acuan dan bisa menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa menunjang keberhasilan dari Program

CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*).

Dari indikator sumber daya dapat dilihat bahwa Sumber Daya Manusia dalam Program CHSE ini kurang efektif dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia untuk melibatkan didalam program CHSE ini.

Sementara banyak nya sektor usaha pariwisata tidak sebanding dengan sumber daya dari agen pelaksana kebijakan. Setelah itu dapat kita lihat bahwa sumber daya yang terdiri atas dana dan atau intensif lainnya belum mendukung dari pelaku usaha kelas menengah ke bawah. Dikarenakan program CHSE ini memang tidak ada anggaran untuk pengimplementasiannya di lapangan. Untuk pemerintah daerah juga kurang melakukan pelatihan secara rutin terhadap sektor pelaku usaha pariwisata. Itu juga dapat disimpulkan oleh informan yang bersangkutan dengan program CHSE ini.

3. Analisis Karakteristik Organisasi Pelaksana

Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Pusat perhatian pada indikator ini meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety Environment*) ini.

Dari indikator Karakteristik Organisasi Pelaksana, berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan untuk karakteristik organisasi pelaksana sudah efektif dikarenakan dengan hadirnya program CHSE ini sangat mudah diterima oleh pelaku usaha sektor pariwisata baik itu pada sektor usaha kelas menengah keatas maupun kelas menengah ke bawah. Dengan adanya peraturan-peraturan prokes yang memang menjadi kewajiban dalam indikator CHSE ini sudah diterapkan baik oleh sektor usaha pariwisata.

4. Analisis Sikap Para Pelaksana

Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan

sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

Disposisi yang mencakup hal-hal penting dalam proses implementasi kebijakan ialah pihak dinas terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kehendaknya untuk melaksanakan kebijakan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environment*). Dalam mendukung tercapainya Implementasi, dapat dilihat sikap dari pelaksana program CHSE ini sudah baik merupakan progres yang sangat positif yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membangkitkan kembali sektor usaha pariwisata. Terkait arah respon yang diberikan masyarakat sebagai pelaku usaha sektor usaha kelas menengah ke atas dan kebawah mereka sangat mendukung akan adanya program ini. Demikian pula program ini merupakan syarat dibukanya kembali sektor pariwisata di Kabupaten Bintan.

Terkait sikap dari pelaksana kebijakan dalam hal ini yang berperan ialah Dinas Pariwisata sebagai pendorong kebijakan ini berlaku di Kabupaten Bintan. Mereka juga melakukan pengecekan dan pemantauan jika ada yang melakukan pendaftaran sertifikasi CHSE ke lokasi langsung, sehingga jika pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi CHSE setelah itu pun masih dilakukan pengecekan apakah indikator itu tetap berjalan sesuai dengan pedoman CHSE.

5. Analisis Komunikasi Antarorganisasi dan Aktifitas Pelaksana

Semakin baik komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses Implementasi, maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi akan semakin kecil untuk terjadi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks.

Dari indikator komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana dapat dilihat bahwa pencapaian komunikasi antar

organisasi sudah dilakukan oleh pemangku kebijakan ini di buktikan dari diadakannya sosialisasi dan pelatihan terhadap pelaku sektor usaha pariwisata.

6. Analisis Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah hingga swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Variabel ini mencakup sumberdaya sosial, ekonomi dan politik yang dapat mendukung keberhasilan program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety Environment*) ini.

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety Environment*) karakteristik para partisipan dalam hal ini dengan mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang berada di lingkungan. Serta apakah elit politik mendukung implementasi program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) ini. Dari segi lingkungan sosial, ekonomi dan politik kerja sama yang dilakukan oleh pelopor kebijakan dan sektor privat. Dari segi ekonomi juga perlahan-lahan sudah mulai ada perkembangan untuk sektor usaha pariwisata.

Dari hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan dari sudut pandang antara Sektor Usaha Pariwisata yang sudah tersertifikasi CHSE dan yang belum mendapatkan Sertifikasi CHSE. Dari segi pengunjung yang datang pada sektor usaha menengah keatas itu memang kebanyakan pengunjung mancanegara, Luar Kota atau pengunjung Nussantara yang bisa dikatakan pengunjung kelompok elite yang

memang memperhatikan keamanan didalam perjalanan.

Sementara pada sektor usaha kelas menengah kebawah kebanyakan dari wisatawan lokal dan wisatawan Nusantara yang kebanyakan dari kelas Ekonomi yang rendah. Mereka tidak terlalu memperhatikan indikator CHSE dan tidak berpengaruh pada segmentasi pasar. Hal ini juga berkaitan dengan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yang terdapat perbedaan dan membedakan antara Pelaku usaha yang sudah mendapat sertifikasi CHSE, pengunjung sangat peduli akan kenyamanan dan keamanan yang berada di Lingkungan objek wisata dengan paket pariwisata yang ditawarkan mereka tetap hati-hati didalam pemilihan tempat pariwisata.

Sedangkan untuk yang belum mendapatkan sertifikasi CHSE, mereka tidak memperdulikan terhadap objek wisata yang ditawarkan, mereka hanya memikirkan bisa berwisata dengan *budget* yang mereka miliki, terkait dengan Indikator CHSE mereka tidak terlalu memperhatikan. Dalam hal ini diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan bersama Pelaku Usaha Sektor Pariwisata bisa membuat sebuah promosi digital yang bisa mendorong pariwisata untuk ramai dikunjungi masyarakat Lokal maupun wisatawan Nusantara, dengan memberikan Promosi paket pariwisata dengan sudah mempertimbangkan keseluruhannya baik itu dari segi biaya dan segi fasilitas yang akan di keluarkan pelaku usaha juga mempertimbangkan untung yang akan didapat dari promosi yang diberikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti, diperoleh sebuah kesimpulan dari Implementasi Program *Cleanliness, Health, Safety, Environment* Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan) belum berjalan optimal dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai di Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang ahli sebagai pelopor kebijakan, dikarenakan banyaknya sektor usaha

pariwisata tidak seimbang dengan sumber daya yang ada di pemerintah Kabupaten Bintan. Namun untuk sasaran tujuan Program ini sudah maksimal dikarenakan Kabupaten Bintan menjadi penerima sertifikasi pertama CHSE diseluruh Indonesia. Untuk itu memang sektor usaha pariwisata kelas menengah ke atas sudah mendapat sertifikasi CHSE dan untuk sektor usaha pariwisata menengah ke bawah memang terkendala dari pelaku usahanya sendiri yang belum menerapkan indikator-indikator yang ada di pedoman CHSE ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, M. (2020). *Manajemen Strategik Daya Saing Dan Globalisasi*.
- Abidin, Z. S. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Cendekia, M. S., Ismail Nurdin, M. S., Dra. Sri Hartati, M. S., & 228/JTI/2019, A. I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabatcendekia.<https://books.google.co.id/books?id=Tretdwaaqbaj>
- Karmanis, Karjono, & Ibda, H. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.<https://books.google.co.id/books?id=Oneveaaqbaj>
- George C Edward III. (N.D.). *Buku Implementasi Edward III*. Pdf.
- Kaho, J. R. (1988). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Pers. <https://books.google.co.id/books?id=Xzwfaaaaj>
- Meter, C. V. (1975). *Model-model dalam Kebijakan*. Yogyakarta.
- Salusu, M. A. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik*. Gramedia Widiasaranaindonesia.<https://books.google.co.id/books?id=Csbgdwaaqbaj>
- Purwanto & Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Penerbit Gava Media. <https://books.google.co.id/books?id=Tpaymwacaaj>
- Rodgers, S. (2017). *Metode Penelitian*. *Sampe Journal*, 53(3), 44.
- Samnuzulsari, T. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (W. E. Yudiantmaja (Ed.)). Umrah Press.
- Sandara Oliver. (2001). *Seri Pr: Strategi Pr*. Esensi. <https://books.google.co.id/books?id=Gqnrskeoiac>

- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Administrasi Negara* (S. T. Apri Nuryanto, S.Pd. (Ed.)). Alfabeta, Cv.
- Sulistiyastuti, E. A. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Usman, Husaini, P. S. A. (2017). *Metode Penelitian Sosial* (Ke-3). Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2016a). *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPC (Center Of Academic Publishing).

Skripsi dan Jurnal

- Affandi, Z. (2019). *Implementasi Kebijakan Waktu Operasional Usaha Pariwisata (Studi Di Kota Tanjungpinang)*. 1, 105–112.
- Agustine, A. D., & Dwinugraha, A. P. (2021). *Strategi Pengembangan Desa Wisata Osing Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19*. 6(2).
- Avichena, I., Mahadewi, N. M. E., & Murdana, I. K. (2021). Implementasi Protokol Kesehatan Berbasis Chse Pada Era New Normal Di Indonesia Tourism Development Corporation The Nusa Dua Bali. *Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)*, 4(1), 32.
<https://doi.org/10.31314/Tulip.4.1.32-44.2021>

- Candranegara, I. M. W. (2021). *3308-Article Text-16639-1-10-20210512*. 1, 27–32.
- Fajri, D. D. (2020). Pelatihan Penerapan Protokol Kesehatan Karyawan Hotel di Masa Tata Normal Baru. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, Volume 1. 60-65.
- Fitri, E. (2019). *Strategi Dinas Pariwisata Dalam Menjadikan Wisata Penyengat Menuju World Heritage Site*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Pratiwi, S. (2019). *Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Pantai Trikora Di Kabupaten Bintan*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Pelliyezer Karo Karo, & Samuel. H. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Restoran Menghadapi Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pagar Alam. Volume 5. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 408.
- Romadhon, A. (2019). *Penyusunan Pola Perjalanan Wisata Bagi Wisatawan*